

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Anthon F Susanto. 2004. *Wajah peradilan kita*. Bandung: Refika Aditama.
- Bernard L. Tanya, ed all. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HR. Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HR. Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indrati. Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang – Undangan 2*. Yogyakarta : PT. Kanisius.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandarlampung.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Rahardjo. Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ratnapala. Suri. 2009. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Ridwan. Juniarso. Ahmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*. Bandung : Penerbit Nuansa.

- Rohmah. Iffa. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses: Pukul 20.00 WIB. Tanggal 10 November 2018.
- Saebani. Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sirajun. Dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara press.
- Soekanto. Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro. Roni Hanitijo. 1990. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujamto. 1983. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.